HARIAN UMUM NusaBali

Dewan Karangasem Setujui RAPBD 2016

• NUSABALI/NANTRA

PENJABAT Bupati Ida Bagus Ngurah Arda (kanan) menandatangani RAPBD jadi Perda APBD 2016, di DPRD Karangasem, Senin (30/11).

AMLAPURA, NusaBali

DPRD Karangasem akhirnya menyetujui RAPBD 2016 untuk diusulkan jadi Perda APBD 2016, setelah melalui pembahasan alot yang menghabiskan waktu total selama 24 jam, pada 24–27 November. Sebab, rata-rata pembahasan di DPRD pukul 08.00-14.00 Wita, atau 6 jam tiap hari, total pembahasan RAPBD dilakukan selama 24 jam. Tetapi, fraksi-fraksi yang ada di DPRD memberikan catatan penting, dalam hal pelaksanaan APBD 2016 mendatang.

Juru bicara DPRD I Komang Mustika Jaya melaporkan hasil rapat gabungan komisi dan pandangan akhir fraksi, semua fraksi memberikan catatan kepada eksekutif agar lebih efektif dan efisien menggunakan anggaran. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi, dihadiri Penjabat Bupati Ida Bagus Ngurah Arda, di Ruang Rapat DPRD, Senin (30/11).

Mulanya, DPRD mengagendakan rapat-rapat hingga tengah malam, ternyata di luar dugaan, rata-rata jalannya rapat berakhir lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, bahkan merupakan pembahasan RAPBD tercepat selama ini, hanya 4 hari, atau per hari membutuhkan waktu 6 jam.

Penjabat Bupati IB Ngurah Arda mengakui, pembahasan RAPBD berjalan alot, tetapi menghasilkan pemikiran yang cerdas untuk kepentingan masyarakat Karangasem. "Kami akui dengan waktu sempit, RAPBD tuntas kita bahas, karena semuanya memiliki kepentingan untuk masyarakat Karangasem," kata IB Ngurah Arda.

Dalam usulan RAPBD 2016, kata Nengah Sumardi, terjadi defisit hingga Rp 44,5 03 miliar. Sebab, defisit itu merupakan selisih belanja daerah Rp 1,583 triliun dengan pendapatan daerah Rp 1,538 triliun. "Tetapi defisit itu telah tertutupi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2015," katanya.

Terungkap pula penerimaan pembiayaan Rp 73,003 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp 28,5 miliar, pembiayaan netto Rp 44,5 miliar. k16

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Hakim Bingung, Pledoi Terdakwa Ditolak

★ Sidang Dugaan Mark Up Pengadaan Lahan BP3TKI Denpasar

Menurut terdakwa, Pageh pledoinya sebenarnya berisi soal niatnya untuk mengembalikan uang Rp 200 juta yang didapatnya dari mark up pengadaan lahan.

• NUSABALI/HENDRA

TERDAKWA kasus korupsi dan mark up Lahan BP3TKI Denpasar, I Wayan Pageh saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (28/10) lalu.

DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut 7,5 tahun penjara, I Wayan Pageh yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi mark up pengadaan lahan untuk kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar membacakan pledoi (pembelaan) di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Senin (30/11). Dalam sidang, majelis hakim menolak pledoi yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan alasan tidak jelas.

Sidang yang dipimpin majelis hakim pimpinan Edward Harris Sinaga serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nyoman Sulitra mengagendakan pembacaan pledoi yang akan dilakukan terdakwa Pageh dan kuasa hukumnya, IGKG Yusa Arsana Putra dan I Gede Astawa.

Dalam pledoi yang diba-

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - - -

cakan kuasa hukumnya kembali menyeret staf khusus Kepala BNPTKI Jakarta, Wahyu Matondang alias Dodik. Disebutkan jika dalam aliran uang hasil korupsi tersebut, terdakwa Pageh hanya mendapat Rp 200 juta dan langsung diseret ke Pengadilan Tipikor. Namun Dodik yang jelas-jelas menerima Rp 1,5 miliar hingga kini tak tersentuh. "Tuntutan jaksa kami anggap tidak memenuhi rasa keadilan," ujar kuasa hukum Pageh.

Dalam pledoi juga merinci peran yang dilakukan terdakwa lainnya, yaitu Priyo Adi Santoso yang terlibat aktif mulai perencanaan hingga pengambilan uang hasil mark up yang dibagikan ke beberapa orang. Kuasa hukum Pageh juga tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut sesuai dakwaan primer. "Perbuatan terdakwa hanya sesuai dengan dakwaan subsidair dan kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa," pungkasnya.

Setelah kuasa hukumnya membacakan pledoi, majelis hakim mempersilahkan Pageh membacakan pledoi yang ditulisnya sendiri. Usai pembacaan, majelis hakim langsung menolak pledoi yang dibacakan Pageh karena tidak jelas. "Pledoi apa yang kamu buat. Ini semakin membingungkan saya. Ini tidak akan saya masukkan sebagai pertimbangan," tegas Edward yang akan melanjutkan sidang, Senin (7/12) mendatang.

Ditemui usai sidang, Pageh mengatakan pledoinya sebenarnya berisi soal niatnya untuk mengembalikan uang Rp 200 juta yang didapatnya dari mark up pengadaan lahan tersebut. Bahkan Pageh mengatakan sudah meminjam uang ke bank untuk mengembalikan kerugian negara, namun akhirnya ditolak karena lebih dulu ditahan. "Nanti akan saya sampaikan secara lisan dalam sidang berikutnya," imbuh Pageh yang ditemui usai sidang. **rez**

2

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan Dicoret

★ Hibah Dipastikan Tak Dapat Cair Tahun 2015

Kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp 90 miliar juga dicoret. Pembatalan TPP dan kenaikan tunjangan perumahan dewan dilakukan setelah dewan dan TAPD rapat terbatas.

MANGUPURA, NusaBali

Rencana Pemkab Badung menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun anggaran 2016 dicoret alias dibatalkan. Tambahan kenaikan tunjangan perumahan bagi kalangan dewan juga dicoret. Tambahan kenaikan tunjangan perumahan sebetulnya masuk dalam RAPBD 2016. Akan tetapi dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2016 di gedung dewan, Senin (30/11) sekitar puku 16.00 Wita, tambahan kenaikan tunjangan perumahan dewan batal. Hibah pun dipastikan tak bisa cair tahun 2015, karena masuk dalam Silpa yang digunakan pada tahun anggaran 2016.

Pembatalan TPP dan kenaikan tunjangan perumahan dewan terbilang dilakukan pada detik-detik terakhir. Sebelum rapat paripurna digelar, anggota dewan sempat melakukan rapat terbatas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sekitar pukul 12.30 Wita. Rapat diduga kuat karena terjadi tarik ulur kepentingan antara legislatif dengan eksekutif.

Usai rapat terbatas itu, Ketua TAPD yang juga Sekkab Badung Kompyang R Swandika mengemukakan rencana pembatalan kenaikan TPP. "Memang semula ada rencana kenaikan TPP sebesar Rp 90 miliar. Setelah dilakukan pembahasan diputuskan rencana kenaikan tersebut diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Setelah melalui pembahasan alot, rencana kenaikan TPP atau sering disebut insentif sebesar Rp 90 miliar akhirnya dicoret dalam RAPBD 2016 yang baru disahkan. Dalam rancangan eksekutif mengusulkan TPP sebesar Rp 408,3 miliar, naik Rp 90 miliar dari tahun 2015 yang sebesar Rp 318,3 miliar lebih.

Begitu pun dengan kenaikan tunjangan perumahan bagi dewan. Berdasarkan rancangan semula untuk ketua dewan yang semula mendapatkan Rp 19,95 juta per bulan, naik menjadi Rp 29,5 juta per bulan. Untuk wakil

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan - - -

ketua yang semula Rp 19,75 juta per bulan menjadi Rp 24,5 juta per bulan. Sedangkan anggota hanya mendapatkan kenaikan Rp 400 ribu, yaitu yang semula menerima Rp 19,5 juta kini mendapatkan Rp 19,9 juta per bulan. Tambahan tunjangan perumahan dewan pada 2016 mendatang sebesar Rp 428,4 juta, atau totalnya Rp 9,7 miliar lebih. Tapi akhirnya rancangan ini pun mental alias dicoret.

Kemudian terkait hibah kepada masyarakat yang diarahkan DPRD sebesar Rp 93,6 miliar lebih serta hibah kepada banjar adat, desa adat, dan subak sebesar Rp 19,9 miliar lebih juga dipastikan tak cair tahun 2015. Sebagai gantinya anggaran tersebut masuk dalam postur RAPBD 2016 yang sudah disahkan kemarin. Mengenai pencoretan TPP, kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan, termasuk masalah hibah ini disetujui seluruh anggota dewan.

Secara umum postur RAPBD 2016 sempat dijabarkan oleh Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria. Menurut dia, RAPBD Kabupaten Badung 2016 dapat disepakati dan ditetapkan dengan perubahan meliputi, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp 3.598.525.631.619,64 berubah menjadi Rp 3.771.209.828.733,46, belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp 3.636.407.759.889,64 berubah menjadi Rp 4.080.562.011.140,64. Pembiayaan dari penerimaan silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 10.781,06 berubah menjadi Rp 39.843.654.781,28. Sehingga postur RAPBD 2016 menjadi sebagai berikut : pendapatan daerah sebesar Rp 3.771.209.828.733,46 meningkat sebesar Rp 172.684.197.113,82. Belanja daerah sebesar Rp 4.080.562.011.140,64 meningkat sebesar Rp 444.154.251.251,00. Defisit Rp 309.352.182.407,18.

"Pembiayaan daerah meliputi penerimaan Rp 518.999.307.188,46 meningkat sebesar Rp 326.313.968.137,40, pengeluaran Rp 169.803.470.000,00 meningkat sebesar Rp 15.000.000.000,00. Pembiayaan netto Rp 349.195.837.188,46 meningkat sebesar Rp 311.313.968.137,40, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 39.843.654.781,28 meningkat sebesar Rp 39.843.914.000,22," beber politisi asal Mengwi tersebut. "Dengan demikian maka ranperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 dapat disepakati, untuk selanjutnya dapat ditetapkan setelah dievaluasi oleh Gubernur Bali," tandasnya.

Setelah pemaparan tersebut, pimpinan rapat paripurna I Made Sunarta yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung, sempat meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir. "Kepada segenap anggota dewan, apakah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016 tersebut dapat disepakati dan ditetapkan," tanyanya. Seluruh anggota dewan yang hadir menjawab sepakat.

Sebagai implementasi dari persetujuan bersama tersebut, pimpinan dewan bersama Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harrry Yudha Saka selanjutnya menandatangani surat keputusan DPRD, nota kesepakatan, serta berita acara. Penandatanganan disaksikan Sekkab Kompyang R Swandika dan Sekwan Made Wira Dharmajaya. **asa**

2

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar Setujui RAPBD 2016✓

• IST

PENJABAT Walikota Denpasar AA Gede Geriya (kiri) menghadiri sidang paripurna di DPRD Kota Denpasar, Kamis (26/11).

DENPASAR, NusaBali

Seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Denpasar tahun 2016 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Kamis, (26/11), di gedung dewan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede juga disahkan enam buah ranperda, yakni Ranperda tentang Izin Usaha Pemondokan, Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda Pengelolaan Cagar Budaya, Ranperda Pendaftaran Usaha Pariwisata, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

APBD Kota Denpasar 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,875 triliun lebih, naik sebesar Rp 70 miliar lebih dari APBD perubahan 2015 yang terdiri dari (PAD) Rp 715 M lebih, dana perimbangan Rp 794 M lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 365 M lebih.

Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan IB Kompyang Wiranata menyebut, pajak daerah sebagai sumber utama PAD masih didominasi oleh pajak hotel dan restoran sebesar 74,54 %. Sedangkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami penurunan target, karena adanya perubahan atas Perda No 7/2010 tentang BPHTB.

Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Putu Metta Dewinta Wandy menyampaikan, anggaran bidang pendidikan sebesar 22,96 % agar alokasinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan SMA, SMK, SMP, SD, TK, dan PAUD. Serta dapat dimanfaatkan untuk menambah anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan AA Susruta Ngurah Putra mengatakan gambaran umum RAPBD Kota Denpasar 2016 ini telah memberikan harapan positif bagi semua masyarakat, khususnya dari sektor pendapatan.

Fraksi Gerindra yang dibacakan I Kompyang Gede menyampaikan agar Pemkot Denpasar memberikan perhatian lebih terhadap wabah rabies dengan memperhatikan ketersediaan VAR yang memadai.

Sedangkan Fraksi Hanura yang dibacakan I Nyoman Tamayasa menyampaikan agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, gorong-gorong, pendidikan termasuk pelatihan bagi guru-guru SD khususnya guru honorer.

Penjabat Walikota Denpasar AA Gede Geriya sangat mengapresiasi atas disahkannya RAPBD dan enam ranperda. Hal ini menandakan kebersamaan yang baik untuk membangun Kota Denpasar lebih baik. Terkait usul saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Geriya mengatakan akan melakukan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai urgensi dan skala prioritas. @

Edisi : Jumat, 27 Nov 2015

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Tahun 2016, Tenaga Abdi di SMP Dapat Tambahan Honor

NEGARA, NusaBali

Setelah tenaga abdi tingkat SD, kini tenaga abdi tingkat SMP di Kabupaten Jembrana dianggarakan mendapat tambahan honor bulanan mulai tahun 2016. Berbeda dengan para abdi SD yang diberikan tambahan Rp 300 ribu per bulan mulai tahun 2015 lalu, para abdi baik guru maupun tata usaha SMP ini diberikan sedikit lebih tinggi yakni Rp 350 ribu per bulan.

Kadis Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Jembrana, Nengah Alit mengatakan, anggaran untuk tambahan honor abdi SMP mencapai Rp 1 miliar lebih. Penganggaran tambahan tersebut untuk memberikan perhatian kepada guru dan tata usaha (TU) abdi SD maupun SMP yang selama ini mengandalkan sisa anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Selama ini tenaga abdi ini penghasilannya sangat bervariatif, tergantung anggaran BOS," ungkap Alit, Minggu (29/11).

Sementara tenaga abdi di SMA untuk tahun 2016 belum dianggarkan. Selain akan diambil alih Pemprov Bali, menurutnya ada pertimbanhan atas nafkah tenaga abdi SMA yang dinilai sudah lebih tinggi dibanding SD maupun SMP. "Sebelumnya amggaran untuk SD dan SMP bertahap karena keterbatasan anggaran. Kalau SMA ya kami rasa sudah agak tinggi," tambahnya.

Para tenaga abdi, baik guru maupun TU di SD dan SMP honornya di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Mereka rela mengabdi dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS. Peranan mereka pun dirasa sangat membantu untuk masalah kekurangan guru, khususnya di SD se-Kabupaten Jembrana. "Kami sadari kalau bicara UMK, masih sangat jauh. Maka dari itu kami berusaha perhatikan dengan tambahan ini," tandas Alit. **ode**

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 7